**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI KAWASAN GERBANGKERTOSUSILA TAHUN 2012-2017**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh:**

**Rizal Aryanto**

**125020100111046**

****

**JURUSAN ILMU EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

**2019**

****

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan**

**(Studi Kasus : Kawasan Gerbangkertosusila Tahun 2012-2017)**

**Rizal Aryanto**

Fakutlas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email :rizalaryanto@gmail.com

*ABSTRAK*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, sektor industri, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertosusila. Sampel dari penelitian ini yaitu 7 kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan metode Fixed Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki arah yang positif dan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pendapatan asli daerah yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.*

*Kata kunci : Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri, PAD, Dana Perimbangan*

1. PENDAHULUAN

Kawasan Gerbangkertosusila merupakan salah satu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang berada di Provinsi Jawa Timur. Menurut Glaeser dan Khan (2003), kawasan ini memiliki sektor unggulan industri serta memiliki kedekatan lokasi. SWP Gerbangkertosusila sendiri terdiri dari: Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Lamongan. Kawasan ini menjadikan Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonominya. Tujuan dibentuknya SWP Gerbangkertosusila sebagai upaya membuat regionalisasi dengan menekankan kemandirian terhadap wilayah kabupaten/kota. Kawasan Gerbangkertosusila merupakan salah satu kawasan aglomerasi di Provinsi Jawa timur. (Landiyanto, 2005).

**Gambar 1:Peta Wilayah Gerbangkertosusila**



Sumber : JICA Team, 2012

Salah satu tujuan pembangunan Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk suatu negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya (BPS, 2016). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan umum adalah tingkat kemiskinan. Semakin rendah tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk. Kemiskinan adalah sebuah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan (Renggapratiwi, 2009).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil, jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling mudah dilihat untuk melihat seberapa stabilnya perekonomian di suatu wilayah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat menentukan kebijakan-kebijakan apakah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan roda perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat dilihat dari PDB/PDRB suatu daerah. Semakin tinggi atau meningkat nilai PDB/PDRB per kapita suatu daerah akan memberikan gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi. Setiap daerah pada umumnya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang pesat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal, yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. (Haryanto dan Adi, 2007). Menurut Kuncoro (2004), PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mentransfer Dana Perimbangan untuk masing-masing daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sebagai bagian dari pemerataan pendapatan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan yang besarnya tidak sama untuk tiap-tiap daerah. Hal ini dilakukan agar antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak terlalu signifikan ketimpangan perekonomian yang dimiliki. Besarnya dana perimbangan masing-masing daerah ditentukan melalui mekanisme-mekanisme tertentu.

Dari serangkaian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan pembuatan penulisan ilmiah dengan memberi judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kawasan Gerbangkertosusila Periode 2012-2017.

1. **KAJIAN PUSTAKA**

**Kemiskinan**

*World Bank* menguraikan definisi kemiskinan yaitu “*Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya memaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan*”. Istilah kemiskinan merupakan gambaran dari individu atau kelompok tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok atau dasar kebutuhan yang sangat standar dalam kehidupan.

 Menurut Badan Pusat Statistik (2010), untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non-makan. Todaro (2003) mengemukakan bahwa kemiskinan yang terjadi di negara–negara berkembang merupakan akibat dari interaksi antara 5 karakteristik berikut :

1. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
2. Pendapatan perkapita negara-negara dunia ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
3. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.
4. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
5. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.

**Pertumbuhan Ekonomi**

 Pertumbuhan ekonomi secara singkat diartikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya dititikberatkan pada tiga aspek, yaitu proses, peningkatan *output* per kapita dan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, disini dapat dilihat adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat perekonomian sebagai sesuatu yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Budiono, 1992).

Prof. Simon Kuznet, mendefiniskan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jinghan, 2012) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional riil atau PDB dalam jangka panjang yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa secara agregat sehingga kemakmuran masyarakat dapat meningkat.

**Industri**

Industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian secara sempit, industri atau industri pengolahan adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*).

**Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Menurut Simanjuntak (2005), PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas karena nilai dan proporsinya yang cukup dominan untuk mendanai daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari PAD menurut Pasal 3 UU No.33 Tahun 2004 yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.Sumber sumber pendapatan asli daerah terdapat 4 macam yaitu : 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) Lain-lain pendapatan yang dipisahkan

**Dana Perimbangan**

Kebijakan desentralisasi fiskal dimulai pada tahun 2001 yang bertumpu pada alokasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikenal sebagai dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005)

Pengalokasian dana perimbangan ini dituangkan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), baik yang berasal dari pajak maupun sumber daya alam. Pada hakikatnya, dana perimbangan dapat ditujukan untuk menurunkan ketimpangan fiskal vertikal (ketimpangan antar tingkat pemerintahan) maupun horizontal (ketimpangan antar pemerintah daerah).

Dengan adanya pemberian tanggung jawab dan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah kabupaten/kota dapat meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki layanan terhadap masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kesempatan yang lebih besar dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di daerahnya masing-masing.

**Teori Pusat Pertumbuhan**

Salah satu teori yang menjelaskan bagaimana sebuah wilayah dapat berkembang dalam kerangka pusat pertumbuhan dikemukakan oleh Myrdal dalam teori sebab-akibat kumulatif. Menurut Myrdal, bahwa sebuah pusat pertumbuhan yang berupa konsentrasi inudstri akan membawa dampak domestik serta dampak eksternalitas atau dampak horizontal dan vertikal. Dampak horizontal sebuah industri adalah segala hal yang berkaitan dengan keberadaan aktifitas akibat lanjutan dari bertambahnya tenaga kerja yang dikarenakan adanya industrialisasi. Sedangkan dampak vertikal adalah akibat lanjutan dalam struktur industri dengan munculnya mata rantai industri yang lebih luas dari keberadaan industri utama yang selanjutnya dapat mengakibatkan munculnya dampak vertikal dan horizontal lain sehingga terjadi akumulasi pada wilayah dimana pertama kali dibangun industri tersebut (Gore, 1984).

Strategi kutub/pusat pertumbuhan pada akhirnya akan membawa dampak terjadinya disparitas wilayah kemiskinan. Sebagaimana menurut Myrdal (1976) dalam Susantono (2013) bahwa daerah yang tertinggal akan semakin tertinggal karena sumber daya yang dimiliki diserap oleh wilayah perkotaan, sedangkan wilayah perkotaan akan semakin menambah daya tarik para penduduk daerah tertinggal. Sehingga yang terjadi adalah peluang perkembangan perekonomian hanya akan terkonsentrasi di wilayah perkotaan saja.

**Hipotesis Penelitian**

 Adapun hipotesis penelitian ini, yaitu sebagaiberikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kawasan Gerbangkertosusila
2. Kontribusi Sektor Industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kawasan Gerbangkertosusila
3. Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kawasan Gerbangkertosusila
4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kawasan Gerbangkertosusila
5. **METODE PENELITIAN**

**Pendekatan Penelitian**

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Arikunto (2006) penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel kabupaten/kota kawasan Gerbangkertosusila tahun 2012-2017. Data yang diambil bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing kabupaten/kota dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

**Definisi Operasional**

 Dalam penelitian ini Tingkat Kemiskinan menjadi variabel dependen dengan menggunakan satuan persen. Untuk variabel independennya meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari peningkatan/penurunan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dengan satuan persen
2. Sektor Industri penelitian ini diperoleh dari kontribusi PDRB sektor industri masing-masing kabupaten/kota yang telah dibagi dengan jumlah total sektor dengan satuan persen
3. Pendapatan asli daerah masing-masing kabupaten/kota dalam satuan miliar rupiah
4. Dana perimbangan yang berasal dari jumlah DAU, DAK, dan DBH dalam satuan miliar rupiah

**Metode Analisis**

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* yang didapat dari hasil Uji Chow dan Uji Hausman. Model estimasi regresi yang digunakan dapat dituliskan sebagai berikut :

## POVit = β0 + β1 PDRBit + β2 INDit + β3 TRFit + β4 PAD + εit

**Keterangan:**

POV = Tingkat Kemiskinan

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

IND = Kontribusi Sektor Industri

TRF = Dana Perimbangan

PAD = Pendapatan Asli Daerah

ε = *Error Term*

**Uji Koefisien Determinasi (R2)**

Uji signifikasi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kesalahan atau kebenaran dari hasil hipotesis nol dari sampel. Adapun uji signifikasi yang digunakan Koefisien Determinasi (R2) yang intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koeefisien determinan tinggi (Ghozali, 2011).

**Uji Hipotesis Statistik**

 Uji hipotesis statistik terdiri dari dua uji; uji statistik t dan uji statistik f. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Menurut Ghozali (2013:98) uji statisktik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen dengan tingkat keyakinan 95% (α = 0.05). Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel anova.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Normalitas**

**Gambar 2 : Hasil Uji Normalitas pada *Fixed Effect Model***

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10

Berdasarkan uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai probability J-B adalah sebesar 0.024036. Angka tersebut kurang dari dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

**Uji Mulitkolinearitas**

**Tabel 1 : Uji Multikolinearitas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PDRB** | **Kontribusi Sektor Industri** | **PAD** | **Dana Transfer** |
| **PDRB** | 1 | 0.4588 | 0.9254 | 0.7878 |
| **Kontribusi Sektor Industri** | 0.4588 | 1 | 0.3551 | 0.1985 |
| **PAD** | 0.9254 | 0.3551 | 1 | 0.7490 |
| **Dana Transfer** | 0.7878 | 0.1985 | 0.7490 | 1 |

 Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10

Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel independen PDRB dan PAD lebih dari 0,8. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan terkena deteksi multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

**Gambar 3 : Hasil Uji Heteroskedastisitas pada *Fixed Effect Model* Menggunakan Uji Glejser**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dependent Variable: RESABS |  |  |
| Method: Panel Least Squares |  |  |
| Date: 07/15/19 Time: 13:35 |  |  |
| Sample: 2012 2017 |  |  |
| Periods included: 6 |  |  |
| Cross-sections included: 7 |  |  |
| Total panel (balanced) observations: 42 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| C | -12.97736 | 7.688926 | -1.687799 | 0.1015 |
| PERTUMBUHAN EKONOMI | 4.013432 | 1.649352 | 2.433339 | 0.0209 |
| KONTRIBUSI INDUSTRI | 0.228268 | 0.533788 | 0.427638 | 0.6719 |
| PAD | -0.790996 | 0.401378 | -1.970703 | 0.0577 |
| DANA TRANSFER | -0.680485 | 0.894572 | -0.760683 | 0.4526 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Effects Specification |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Cross-section fixed (dummy variables) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| R-squared | 0.373544 |     Mean dependent var | 0.199839 |
| Adjusted R-squared | 0.171461 |     S.D. dependent var | 0.188171 |
| S.E. of regression | 0.171281 |     Akaike info criterion | -0.470896 |
| Sum squared resid | 0.909452 |     Schwarz criterion | -0.015792 |
| Log likelihood | 20.88881 |     Hannan-Quinn criter. | -0.304082 |
| F-statistic | 1.848468 |     Durbin-Watson stat | 2.304610 |
| Prob(F-statistic) | 0.092903 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10

Berdasarkan tabel 4.15 , dapat diketahui bahwa variabel PDRB nilai probabilitasnya kurang dari 0.05. Hal tersebut berarti bahwa variabel PDRB terkena masalah heteroskedastisitas. Sehingga perlu dilakukan perbaikan menggunakan diagonal *white/robust standard error regression*.

**Gambar 4 : Hasil Regresi Menggunakan *Fixed Effect Model* Setelah Perbaikan Heteroskedastisitas**

|  |  |
| --- | --- |
| Dependent Variable: KEMISKINAN |  |
| Method: Panel Least Squares |  |  |
| Date: 07/15/19 Time: 13:39 |  |  |
| Sample: 2012 2017 |  |  |
| Periods included: 6 |  |  |
| Cross-sections included: 7 |  |  |
| Total panel (balanced) observations: 42 |  |
| White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| C | 42.57112 | 14.43401 | 2.949362 | 0.0060 |
| PERTUMBUHAN EKONOMI | 7.429113 | 4.967143 | 1.495651 | 0.1449 |
| KONTRIBUSI INDUSTRI | 1.544961 | 0.476594 | 3.241672 | 0.0028 |
| PAD | -2.822437 | 0.729309 | -3.870017 | 0.0005 |
| DANA TRANSFER | -4.575143 | 2.124747 | -2.153265 | 0.0392 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Effects Specification |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Cross-section fixed (dummy variables) |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| R-squared | 0.997749 |     Mean dependent var | 11.50825 |
| Adjusted R-squared | 0.997022 |     S.D. dependent var | 5.822274 |
| S.E. of regression | 0.317705 |     Akaike info criterion | 0.764743 |
| Sum squared resid | 3.129038 |     Schwarz criterion | 1.219847 |
| Log likelihood | -5.059597 |     Hannan-Quinn criter. | 0.931556 |
| F-statistic | 1373.855 |     Durbin-Watson stat | 1.173799 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10

**Uji Statistik**

1. **Koefisien Determinasi (R2**)

Koefisien Determinasi atau *Goodness of fit* digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien Determinasi (R²) memiliki kelemahan mendasar yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimaksukkan dalam model. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R²).

**Tabel 2 : Uji Koefisien Determinasi**

|  |  |
| --- | --- |
| R-Squared | 0.997749 |
| Adjusted R – Squares  | 0.997022 |

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai adjusted R-squared sebesar 0.997749. Hal ini berarti bahwa, 99,75 persen tingkat kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila tahun 2012-2017 dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, kontribusi sektor industri, pendapatan asli daerah dan dana transfer. Sedangkan sisanya sebanyak 0,25 persen dijelakan oleh variabel lain di luar model atau faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

1. **Uji Statistik F**

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Dari hasil regresi Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi Sektor Industri, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Terhadap Tingkat Kemiskinan di wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2012-2017 diperoleh nilai F-hitung sebesar 1373.855 diperoleh nilai F-hitung sebesar 0,0000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi Sektor Industri, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Tingkat Kemiskinan).

1. **Uji Statistik t**

Uji t atau uji parsial dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kesehatan dan Pendidikan)

**Tabel 3 : Nilai t- Statistik**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | ***Coefficient*** | ***Std. Error*** | ***t-Statistic*** | ***Prob.*** |
| Pertumbuhan Ekonomi | 7.429113 | 4.967143 | 1.495651 | 0.1449 |
| Kontribusi Sektor Industri | 1.544961 | 0.476594 | 3.241672 | 0.0028 |
| Pendapatan Asli Daerah | -2.822437 | 0.729309 | -3.870017 | 0.0005 |
| Dana Transfer | -4.575143 | 2.124747 | -2.153265 | 0.0392 |

Sumber: Output pengolahan data menggunakan E-Views 10

Berdasarkan hasil Uji t menunjukkan bahwa secara individu, keseluruhan variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen

**Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkat Kemiskinan**

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jawa Timur ada di Kota Surabaya tahun 2017 yaitu sebesar 6,13%. Angka tersebut adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan pekonomian yang ada di Surabaya dalam satu tahun. Jika dilihat dari ekonomi lokal yang tampak tumbuh adalah dari kategori usaha. Menciptakan ekonomi kreatif dengan prinsip kemandirian dan wirausaha merupakan perkembangan perekonomian yang tidak lepas dari pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Kuznet (dalam tambunan, 2014) menjelaskan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir pembangunan terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Sama halnya dengan yang terjadi sesuai uji statistik menunjukkan secara positif tingkat pertumbuhan ekonomi meningkatkan kemiskinan namun seperti yang terjadi di Surabaya sesuai dengan upaya daerah meningkatkan keadaan infrastruktur serta peningkatan pembangunan maka secara perlahan akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sebenarnya tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga bisa jadi justru kemiskinan tersebut meningkat ketika PDRB naik namun tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan yang diperoleh masyarakat itu sendiri.

**Hubungan Sektor Industri dengan Tingkat Kemiskinan**

Sektor industri di kawasan Gerbangkertosusila merupakan salah satu sektor andalan dalam usaha peningkatan roda perekonomian. Peningkatan output dari sektor industri ini tidak secara langsung dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Peningkatan output sektor industri ini jika diimbangi dengan peningkatan sektor-sektor lain akan dapat meningkatkan PDRB, peningkatan PDRB atau pertumbuhan ekonomi tersebut yang memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap kemiskinan.

Pada variabel sektor industri memiliki koefisien yang positif yaitu sebesar 1,544 yang berarti bahwa setiap peningkatan sektor industri sebesar 1% dapat meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 1,5%. Sedangkan nilai probabilitasnya adalah sebesar 0.0028 < 0,05 yang berarti variabel sektor industri ini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Winardi (2017) bahwa sektor industri berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun memiliki arah yang negatif.

Sektor industri yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan berarti bahwa sektor ini masih belum efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila. Hal ini dikarenakan sektor ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan teknologi modern dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga semakin sedikit pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Penurunan kebutuhan akan tenaga kerja selanjutnya dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang berarti juga akan berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin dikarenakan tidak memiliki penghasilan untuk keberlangsungan kehidupannya.

**Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Tingkat Kemiskinan**

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila tahun 2012-2017. Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, rata-rata total penerimaan PAD seluruh kabupaten/kota kawasan Gerbangkertosusila dari tahun 2012-2017 tiap tahunnya meningkat sebesar 18%.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pemerintah daerah mengalami peningkatan kemandirian. Peningkatan kemandirian tersebut berarti pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi-potensi yang terdapat di wilayahnya masing-masing terutama pendapatan dari sektor pajak daerah. Peningkatan pendapatan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menunjang pembangunan wilayahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat yang meningkat dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada pada wilayah kabupaten/kota masing-masing.

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0005 dan nilai koefisien sebesar -2.822437. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan nilai koefisien yang memiliki arah negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 1% dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2%. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Marianus Manek dan Rudy Badrudin (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 21 kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan PAD yang diterima sangat penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota di kawasan Gerbangkertosusila.

**Hubungan Dana Perimbangan dengan Tingkat Kemiskinan**

Dana Transfer atau Dana Perimbangan pada hasil uji statistik memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0392 < 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel dana transfer dari pemerintah pusat baik DAU, DAK, dan DBH berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Chrisanty P, dkk pada tahun 2017 yang melakukan penelitian di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Nilai koefisien menunjukkan hasil yang negatif yaitu sebesar -4.575143 berarti setiap peningkatan dana transfer sebesar 1% dapat mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 4%. Hasil uji regresi tersebut menunjukkan variabel dana transfer memiliki pengaruh yang cukup efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di kawasan Gerbangkertosusila. Penelitian yang dilakukan oleh Marianus Manek dan Rudy Badrudin pada tahun 2016 juga menunjukkan arah yang negatif, namun berpengaruh secara tidak signifikan.

Variabel dana transfer yang memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan ini memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu transfer dana yang berasal dari pemerintah pusat ini dapat digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki layanan terhadap masyarakat sehiingga diharapkan nantinya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pada wilayahnya masing-masing. Sedangkan sisi negatifnya adalah dikhawatirkan pemerintah daerah akan bergantung kepada transfer dana dari pemerintah pusat sehingga potensi-potensi pendapatan yang dimiliki kurang dimaksimalkan. Selain itu, besarnya dana transfer yang meningkat dari tahun ke tahun dikhawatirkan pemerintah daerah tidak dapat memaksimalkan untuk kepentingan masyarakat, namun dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya kurang berdampak langsung kepada masyarakat namun hanya untuk segelintir kelompok saja. Untuk itu, diperlukan kontrol yang ketat dari pemerintah pusat sehingga dana transfer yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan:

1. Pertumbuhan ekonomi di Gerbangkertosusila masih belum dapat menurunkan jumlah penduduk miskin walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan adalah eksklusif dan padat modal. Hanya sebagian penduduk yang menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut, sedangkan sebagiannya lagi masih tergolong penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Sektor industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan namun arahnya positif sehingga diharapkan ke depannya lebih banyak lagi industri-industri yang didirikan bukan hanya yang padat modal saja, tetapi juga padat karya. Tenaga kerja yang digunakan sebaiknya berasal dari masyarakat sekitar tempat dimana industri tersebut berada..
3. Pendapatan asli daerah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di kawasan Gerbangkertosusila. Hal ini dikarenakan variabel pendapatan asli daerah memiliki arah yang negatif dan signifikan terhadap upaya menurunkan jumlah penduduk miskin.
4. Dana perimbangan memiliki arah yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peran yang cukup efektif dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota kawasan Gerbangkertosusila.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, saran dan masukan yang dapat disampaikan antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi yang dilihat menggunakan PDRB menunjukkan masih kecilnya peran sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan pemerintah diharapkan dapat lebih mendorong sektor-sektor tersebut. Pada sektor pertanian bisa dilakukan dengan cara memberi persediaan air yang dapat berupa bendungan-bendungan, membantu petani apabila terdapat saluran air yang rusak dan memberikan bantuan dalam bentuk alat mesin untuk pra dan paska panen. Pada sektor perikanan selain memberikan bantuan beruapa alat mesin, selain itu untuk mendorong sektor-sektor tersebut pemerintah juga dapat memotong birokrasi yang dianggap menyulitkan.
2. Pemerintah daerah seharusnya dapat membuat peraturan yang bisa mendorong para investor baik dalam maupun luar negeri untuk merekrut tenaga kerja dari penduduk sekitar wilayah dimana suatu kawasan industri berada. Sehingga diharapkan hal tersebut dapat secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan pada masing-masing wilayah di kawasan Gerbangkertosusila.
3. Pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan yang diterima diharapkan lebih maksimal lagi untuk mengalokasikan pada program-program yang pro-masyarakat miskin dan efeknya untuk jangka waktu yang panjang, seperti contohnya pemberian pelatihan-pelatihan untuk peningkatan skill masyarakat, membuat peraturan untuk kemudahan izin usaha UMKM dan lain-lain. Sehingga diharapkan nantinya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dapat berkurang dalam 10-20 tahun ke depan.
4. Pemerintah daerah menerapkan transparansi anggaran sehingga masyarakat dapat secara rutin mengontrol dan memberikan masukan-masukan yang dapat mendukung perencanaan pembangunan di kabupaten/kota masing-masing di kawasan Gerbangkertosusila.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan Edisi Ketiga.* Yogyakarta: STIE YKPN.

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Badan Pusat Statistik. (2019, Februari 20). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2012*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: https://jatim.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2019, Februari 20). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: https://jatim.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2019, Februari 15). *Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Terhadap PDRB 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 2010-2016*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur: https://jatim.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2019, Februari 20). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: https://jatim.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2019, Februari 20). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: https://jatim.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2019, Februari 20). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2017*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: https://jatim.bps.go.id/

Badan Pusat Statstik. (2019, Februari 20). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2015*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: https://jatim.bps.go.id/

Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* Yogyakarta: BPFE UGM.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019, Februari 25). *Data Realisasi APBD TA 2012*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019, Februari 25). *Data Realisasi APBD TA 2013*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019, Februari 25). *Data Realisasi APBD TA 2014*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019, Februari 25). *Data Realisasi APBD TA 2015*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019, Februari 25). *Data Realisasi APBD TA 2016*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019, Februari 25). *Data Realisasi APBD TA 2017*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

Hariyanto, D., & Adi, P. H. (2007). *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pendapatan Perkapita.* Makassar: Simposium National Akuntansi X.

Kementerian Perindustrian. (2019, Juli 6). *Kawasan Industri di Gresik Berpotensi Serap Investasi Rp 83,2 Triliun*. Diambil kembali dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: http://www.kemenperin.go.id/

Kuncoro, M. (2001). *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Manek, M., & Badrudin, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 81-98.

Panji, I. P., & Indrajaya, I. G. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 316-337.

Renggapratiwi, A. (2009). *Kemiskinan dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik dan Respon Kebijakan.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-fungsi Manajemen.* Yogyakarta: Bumi Aksara.

Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga.* Jakarta: Rajawali Pers.

Suryahadi, A., Sumarto, S., & Suryadarma, D. (2009). The Effects of Location and Sectoral Components of Economic Growth on Poverty: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Economics 89*, 109-117.

Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Volume 8 (Nomor 03).

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jilid 1.* Jakarta: Erlangga.

Wijono, W. W. (2005). *Mengungkap Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi.*

Winardi. (2017). *Dampak Pembangunan Kawasan Industri terhadap Output, Penyerapan Tenaga Kerja, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan Rumah Tangga Jawa Barat.* Bogor: Institut Pertanian Bogor.